

# ANALISIS PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDANAAN PENDIDIKAN DI PROVINSI YOGYAKARTA

Oleh: Arif Rohman, Mami Hajaroh, Riana Nurhayati, Ebni Sholikhah

## ABSTRAK

Kualitas pendidikan bergantung pada input pendanaan yang ternyata masih dihadapkan pada sulitnya masyarakat dalam memenuhi biaya pendidikan. Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki tanggungjawab untuk menyelenggarakan pendidikan serta pendanaannya sebagai implikasi diberlakukannya otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan melihat perumusan kebijakan pendanaan pendidikan di Provinsi Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Analisis perumusan kebijakan menggunakan teori Dunn (2000) dengan pendekatan empiris guna menghasilkan tipe informasi deskriptif. Data primer dikumpulkan dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi DIY, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul serta dari data sekunder yang berupa dokumen alokasi pendanaan pendidikan. Hasilnya menunjukkan bahwa perumusan kebijakan pendanaan pendidikan terdiri dari perumusan masalah, identifikasi alternative, dan penetapan anggaran. Perumusan masalah dan identifikasi alternative dilakukan dengan metode brainstorming melalui pertemuan stakeholder pendidikan. Masalah yang terjaring antara lain pemenuhan SPM, kekerasan anak, dan manajemen pendidikan. Sedangkan penetapan anggaran dana melalui mekanisme penyalangan rencana program pendidikan daerah dengan rencana strategi pembangunan daerah oleh Bappeda. Meskipun dalam identifikasi masalah dan penyusunan program dilakukan secara demokratis sayangnya dalam penetapan anggaran dana dilakukan secara birokratis dan bersifat top-down. Alokasi anggaran dana terbesar terdapat pada pos belanja tidak langsung yakni untuk gaji dan tunjangan guru.

Kata Kunci: *Perumusan Kebijakan, Kebijakan Pendidikan, Pendanaan Pendidikan*